

11. URUSAN KOPERASI DAN UKM

Dengan berbagai permasalahan yang ada di sektor dunia usaha khususnya Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Wonosobo maka perlu adanya arah kebijakan yang dapat meningkatkan kapasitas maupun kapabilitas seluruh potensi koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang memiliki daya saing kuat dalam menghadapi era persaingan pembangunan yang semakin ketat khususnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat banyak, dan juga perlu adanya peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Koperasi berperan sangat penting dalam hal peningkatan ekonomi kerakyatan yang dapat memfasilitasi para produsen maupun konsumen dalam persaingan di dunia usaha, menciptakan pasar baru dan juga sebagai sumber inovasi. Begitu pula UKM yang berkontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran guna pemerataan pendapatan ekonomi. Untuk itu Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) ditempatkan pada posisi yang sangat strategis guna meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dan guna menjawab berbagai permasalahan khususnya di sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Kabupaten Wonosobo menyusun rancangan program pengembangan yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu melalui program peningkatan daya saing Koperasi dan UKM diantaranya (1) Menciptakan iklim usaha yang kondusif, (2) Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, (3) Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

Penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar koperasi dan UMKM pada tahun 2016 di Kabupaten Wonosobo diampu oleh OPD Kantor Koperasi dan UMKM. Sejak diberlakukan Perda SOTK OPD Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah urusan ini beralih ke Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM.

a. Program dan Kegiatan

Guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Koperasi dan UKM, pada tahun anggaran 2016 telah dialokasikan dana sebesar Rp 5.551.807.500,- dan telah terealisasi sebesar Rp 4.850.994.889,- atau sebesar 87,38% dari rencana. Proporsi realisasi belanja tersebut sebesar 0,25% dari total belanja APBD tahun 2016 yang berjumlah Rp 1.900.000.000.000,- Dengan rincian anggaran terdapat pada tabel berikut :

Tabel IV.C.11.1
Program dan Realisasi Anggaran Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2016

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
A	Belanja Langsung	3.099.982.500	3.025.900.475
1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	500.000.000	498.770.000
2	Program Pengembangan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	1.750.000.000	1.691.377.007
3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	425.000.000	424.301.650
4	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	175.000.000	174.514.300
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	175.137.500	164.765.879
6	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	74.845.000	72.171.639
B	Belanja Tidak langsung	2.451.825.000	1.825.094.414
1	Belanja Pegawai	2.451.825.000	1.825.094.414
	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.464.461.000	1.384.664.581
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	987.364.000	440.429.833
2	Belanja Hibah dan Sosial	-	-
3	Belanja Tak Terduga	-	-
	Jumlah total	5.551.807.500	4.850.994.889

Sumber : Kantor Koperasi dan UMKM Kabupaten Wonosobo tahun 2016

b. Realisasi Program dan Kegiatan

1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.

Adanya program ini dimaksudkan agar UKM dapat mengembangkan minat berwirausaha dan meningkatkan daya saing sehingga dapat meningkatkan kompetensi UKM yang lebih baik, munculnya pelaku usaha baru, produktivitas UKM meningkat serta meningkatkan produk-produk UKM yang lebih inovatif.

Beberapa kegiatan telah dilakukan guna melaksanakan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah diantaranya :

- ✓ Peningkatan kualitas produk lokal menjadi produk unggulan yang melibatkan 160 orang UMKM, yaitu pada Kecamatan Kejajar, Kecamatan Garung, Kecamatan Mojotengah dan Kecamatan Keping;

- ✓ Peningkatan kewirausahaan ekonomi kerakyatan yang dilaksanakan di Kecamatan Leksono, Kecamatan Selomerto, Kecamatan Wonosobo dan Kecamatan Sapuran yang diikuti oleh 120 orang UMKM.

2) Program Pengembangan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produk-produk UKM yang lebih berkualitas dan dapat lebih mengoptimalkan sumber daya Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) termasuk diantaranya peningkatan kualitas SDM Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Untuk itu dengan adanya program ini kesejahteraan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah akan lebih baik dan tidak terjadi kesenjangan sosial ekonomi.

Pada program ini telah dilakukan beberapa kegiatan diantaranya :

- ✓ Pelatihan Packaging Produk Makanan (DBHCHT) yang diikuti oleh 20 orang UMKM;
- ✓ Bintek Pengembangan Produk Kerajinan Bambu (DBHCHT) yang dilakukan di Kecamatan Kertek dan diikuti oleh 25 orang UMKM;
- ✓ Pelatihan Ketrampilan Alih Teknologi Tepat Guna (ATTG) Produk Singkong (DBHCHT) yaitu pelatihan guna peningkatan SDM yang diikuti oleh 40 UMKM;
- ✓ Pelatihan Produk Aneka Boga (DBHCHT) yang diikuti oleh 40 orang UMKM;
- ✓ Pelatihan Ketrampilan Rajut Tingkat terampil (DBHCHT) diikuti oleh 20 orang UMKM se-Kabupaten Wonosobo;
- ✓ Peningkatan Kualitas Produk Lokal Menjadi Produk Unggulan Daerah dengan melakukan pengadaan peralatan usaha yang diikuti oleh 25 orang UMKM se-Kabupaten Wonosobo;
- ✓ Pelatihan Kewirausahaan dan Budaya Usaha Bagi Masyarakat (DBHCHT) yang diikuti oleh 40 orang UMKM;
- ✓ Pasar Rakyat (DBHCHT) Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pasar yang telah diselenggarakan di 7 lokasi menjelang hari raya;
- ✓ Pelatihan Konveksi Lanjutan (DBHCHT) yang diikuti oleh 25 orang di Kecamatan Kalikajar;
- ✓ Fasilitas Badan Hukum Bagi UMKM / IKM (DBHCHT). Program ini bertujuan agar terfasilitasinya badan hukum bagi UKM/IKM yang diikuti oleh 35 kelompok se-Kabupaten Wonosobo;
- ✓ Pelatihan dan Fasilitas Bagi Koperasi Pertanian (DBHCHT) yaitu melalui kegiatan pelatihan pengembangan unit usaha jamur tiram bagi koperasi agar tercipta unit usaha penanaman jamur tiram di Kabupaten Wonosobo yang diikuti oleh 2 Koperasi beserta anggotanya se-Kabupaten Wonosobo;
- ✓ Promosi Produk Skala Nasional, Regional dan Lokal guna meningkatkan akses pasar bagi UKM pada Pameran HARKOPNAS Jambi, Pameran Gelar Produk UMKM di Wonosobo dan misi dagang ke Konjen RI di Singapura;

- ✓ Pengembangan Produk Unggulan Melalui Sertifikat Produk (DBHCHT) agar dapat meningkatkan kualitas daripada produk-produk UMKM yaitu dengan terfasilitasinya perizinan makanan olahan (20 PIRT, 5 barcode dan 5 label halal);
- ✓ Pelatihan Kewirausahaan (APTI) (DBHCHT) guna mengembangkan SDM UMKM yang diikuti oleh 50 orang se-Kabupaten Wonosobo;
- ✓ Pelatihan Kewirausahaan melalui Program SDSP (Satu Desa Satu Pengusaha) yang diikuti oleh 150 orang UMKM se-Kabupaten Wonosobo;
- ✓ Pengembangan Usaha dan Inovasi Produk UMKM yaitu pada produk olahan UMKM diantaranya singkong dan rebung serta pengembangan bahan produksi boga (minyak, gandum, mentega, rebung, singkong dan packaging produk) diikuti oleh 50 orang UMKM di Kecamatan Leksono dan Kecamatan Kalikajar;
- ✓ Pelatihan Tata Boga (APTI) (DBHCHT) yang diikuti oleh 30 orang Koperasi dan UKM se-Kabupaten Wonosobo.

3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan baik fungsi koperasi, profesionalisme pengurus, program kerja pengurus baik jangka pendek maupun jangka panjang, peningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan pengetahuan dan wawasan akuntansi, pengawasan dan manajemen koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang dan menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya. Dengan demikian diharapkan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat primer dan sekunder akan lebih terkoordinir serta pencapaian dari segi fungsionalitas akan lebih baik lagi. Dan juga sarana dan infrastruktur pendukung pengembangan koperasi diharapkan akan semakin lengkap dan berkualitas, efektifitas lembaga koperasi semakin berfungsi baik, praktek berkoperasi yang baik dan meningkatkan pandangan positif perihal koperasi di kalangan masyarakat.

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan guna mendukung Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, diantaranya :

- ✓ Fasilitasi Sarana dan Penilaian kesehatan KSP, USP, KJKS, dan UJKS Koperasi yang bertujuan guna meningkatkan koperasi sehat yaitu dengan melakukan BinteK Penilaian Kesehatan, Sertifikat Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi;
- ✓ Revitalisasi Koperasi yaitu dengan melakukan kegiatan BinteK Peningkatan Keterampilan Usaha Anggota Koperasi, pengadaan ayam petelur dan pejantan, pengadaan sarana produksi berupa cup sealer yang diikuti oleh 25 orang dan 2 Koperasi sejumlah 2 paket;
- ✓ Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan Koperasi dengan melakukan study banding ke Solo yang diikuti oleh 30 orang dan 30 koperasi;
- ✓ Pelatihan SDM Koperasi Berbasis Kompetensi dengan melakukan study banding ke Solo yang diikuti oleh 30 orang dan 30 koperasi;

- ✓ Pelatihan Akuntansi Dasar dan Aplikasi Akuntansi Komputer (DBHCHT) diikuti oleh 40 orang dan 40 koperasi;
- ✓ Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk OVOP berbasis Koperasi melalui kegiatan pameran di Jawa Barat yang diikuti oleh 4 orang dan 2 Koperasi.

4) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Program ini bertujuan mempermudah, memperlancar dan memperluas akses UMKM kepada sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka, dan potensi sumber daya lokal, serta menyesuaikan skala usahanya sesuai tuntutan efisiensi. Sistem pendukung dibangun melalui pengembangan lembaga pendukung/penyedia jasa pengembangan usaha yang terjangkau, semakin tersebar dan bermutu untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pasar dan sumber daya produktif, seperti sumber daya manusia, modal, pasar, teknologi, dan informasi, termasuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi lembaga keuangan bagi UMKM.

Fokus utama guna melaksanakan program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah antara lain :

- ✓ Kemitraan Usaha Dengan Perusahaan Menengah/ Besar guna meningkatkan akses pasar produk UMKM yang diikuti oleh 60 orang UMKM se-Kabupaten Wonosobo;
- ✓ Bintek Pengembangan Pasar Melalui On line yang diikuti oleh 50 orang UMKM se-Kabupaten Wonosobo.

5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam jangka panjang yaitu terwujudnya kualitas administrasi perkantoran yang tertib dan lancar serta terlaksananya tugas kedinasan dengan cepat dan akurat yaitu melalui : Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Kota dan Pasar.

6) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam jangka panjang yaitu terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan melalui Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor.

c. Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM

Tabel IV.C.11.2
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM tahun 2016
Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Capaian Kinerja	
		2015	2016
1	Koperasi Aktif (Jumlah koperasi aktif/ Jumlah seluruh koperasi) x 100%	233 ----- x 100% 370 = 62,97%	235 ----- x 100% 372 = 63,17%
2	Usaha Mikro dan Kecil (Jumlah usaha mikro dan kecil/ Jumlah seluruh UMKM) x 100%	57.456 ----- x 100% 58.163 = 98,78%	59.142 ----- x 100% 59.245 = 99,83%

Sumber : Kantor Koperasi dan UMKM Kabupaten Wonosobo tahun 2016

Penyelenggaraan urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo dapat dilihat berdasarkan indikator prosentase jumlah koperasi aktif terhadap jumlah seluruh koperasi dan prosentase jumlah usaha mikro dan kecil terhadap jumlah seluruh UMKM. Sampai tahun 2016 koperasi yang berkembang di Kabupaten Wonosobo sebanyak 372 unit dengan rincian kategori aktif 235 koperasi atau dengan rasio 63,17%, dan tidak aktif 137 koperasi. Jumlah usaha mikro dan kecil sebanyak 59.142 unit dengan rasio terhadap jumlah seluruh UMKM sebesar 99,83%.

Tabel IV.C.11.3
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM tahun 2016
Berdasarkan RPJMD 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Capaian	
		2015	2016
1	Persentase Usaha Mikro dan kecil terhadap UKM	98,78%	99,83%
2	Persentase kenaikan tenaga kerja Koperasi	2%	4%
3	Persentase kenaikan tenaga kerja UMKM	0,10%	0,16%
4	Persentase Penambahan jumlah wirausaha baru	2%	2,51%
5	Persentase koperasi terhadap jumlah UMKM	2%	2,2%
6	Persentase kenaikan Jumlah UMKM	3%	6,0%
7	Persentase kenaikan Aset UMKM	3%	5,1%
8	Persentase kenaikan Omset UMKM (juta)	3%	5,0%
9	Persentase Koperasi yang mampu mengakses pembiayaan dari Lembaga Keuangan	65%	71%

IV.C.11. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi dan UKM

No	Indikator Kinerja	Capaian	
		2015	2016
10	Persentase UMKM yang mampu mengakses pembiayaan dari Lembaga Keuangan	4%	7%
11	Persentase UMKM memiliki perijinan	60%	65%
12	Persentase kenaikan Aset Koperasi	1,20%	2,21%
13	Persentase kenaikan Omset Koperasi	1,20%	2,21%
14	Persentase koperasi sehat terhadap koperasi aktif	50,00%	57,00%
15	Persentase jumlah koperasi aktif terhadap jumlah koperasi	63%	66%

Sumber : Kantor Koperasi dan UMKM Kabupaten Wonosobo tahun 2016

Dari tabel capaian kinerja program yang dilaksanakan Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo pada tahun 2016 menunjukkan diantaranya presentase usaha kecil terhadap UKM mencapai 99,83% atau meningkat 1,05% dari tahun 2015, presentase kenaikan tenaga kerja koperasi sebesar 4%, presentase kenaikan tenaga kerja UMKM sebesar 0,16%, presentase penambahan jumlah wirausaha baru sejumlah 2,51%, presentase koperasi terhadap jumlah UMKM sebesar 2,2%, presentase kenaikan jumlah UMKM sebesar 6% presentase kenaikan aset UKM 5,1% presentase kenaikan omset UMKM sebesar 5%, presentase koperasi yang mampu mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan sejumlah 71%, presentase UMKM yang mampu mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan sejumlah 7%, presentase UMKM yang memiliki perijinan 65%, presentase kenaikan aset koperasi 2,21%, presentase kenaikan omset koperasi 2,21%, presentase koperasi sehat terhadap koperasi aktif 57%, dan presentase jumlah koperasi aktif terhadap jumlah koperasi 66%. Berdasarkan pencapaian tersebut diharap di tahun-tahun mendatang dapat terjadi peningkatan yang lebih baik lagi.

d. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan urusan koperasi dan UKM serta upaya yang perlu dilakukan antara lain :

Tabel IV.C.11.4

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Koperasi dan UMKM

No	Permasalahan	Solusi/ Upaya yang dilakukan
1	Rendahnya daya saing koperasi dan UMKM dalam mengakses pasar	Peningkatan kapasitas dan produktivitas koperasi dan UMKM dalam rangka pengembangan produk yang berkualitas, inovatif dan kreatif
2	Masih kurangnya kemampuan koperasi dan UMKM dalam penguasaan teknologi informasi	Peningkatan nilai tambah produk dengan pemanfaatan teknologi yang inovatif, agar mampu bersaing baik di pasar domestik maupun mancanegara

IV.C.11. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi dan UKM**

No	Permasalahan	Solusi/ Upaya yang dilakukan
3	Promosi dan pemasaran yang belum optimal serta terbatasnya informasi pasar mengenai produk unggulan daerah	Peningkatan promosi produk Koperasi dan UKM di pasar domestik maupun internasional, melalui promosi produk unggulan, menyediakan informasi pasar berbasis IT, dan menyediakan sumber daya manusia untuk menjalankan fungsi pemasaran.
4	Belum optimalnya kemitraan usaha antara koperasi dan UMKM dengan pelaku usaha lainnya	Peningkatan pengembangan kemitraan yang melibatkan koperasi dan UMKM dalam pengembangan produk-produk unggulan yang berbasis rantai nilai, subkontrak, alih teknologi, pemasaran/ekspor, atau investasi
5	Masih sulitnya akses koperasi dan UMKM terhadap sumber-sumber pembiayaan dan permodalan	Fasilitasi akses koperasi dan UMKM kepada jenis sumber pembiayaan, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan koperasi dan UMKM (sejenis KUR/KKPE dsb), kemudahan pembiayaan dan sertifikasi tanah, yang didukung adanya regulasi yang jelas